

**TESIS**

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK PEJABAT PEGAWAI  
NEGERI SIPIL (PPNS) KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA PEKANBARU TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO TANPA IZIN**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memenuhi Gelar Magister Ilmu  
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas**



**OLEH :  
RIAN RUSMANA PUTRA, SH  
NIM: 2020112065**

**DOSEN PEMBIMBING :**

- 1. Prof. Dr. Ismansyah, S.H, M.H**
- 2. Dr. Nani Mulyati, S.H, MCL**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
TAHUN 2022**

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK PEJABAT PEGAWAI  
NEGERI SIPIL (PPNS) KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGUNAAN  
SPEKTRUM FREKUENSI RADIO TANPA IZIN**

**(Rian Rusmana Putra, 2020112065, Program Studi Magister Ilmu  
Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 144 Halaman, 2022)**

**ABSTRAK**

Pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penggunaan spektrum frekuensi radio tanpa izin akan dilaksanakan setelah mengetahui adanya suatu gangguan terhadap frekuensi radio lain. Gangguan pada frekuensi tersebut dapat menimbulkan bahaya dan merugikan masyarakat, contohnya pada bidang penerbangan akan terjadi gangguan komunikasi antara Pilot dengan *Air Traffic Controller*. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi pada Pasal 38 Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi lainnya, pelaksanaan penyidikan pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi radio dilaksanakan oleh PPNS Balmon dan berkoordinasi dengan Penyidik Polri. Terlambatnya bantuan koordinasi oleh Penyidik Polri kepada PPNS Balmon mengakibatkan penyidikan pelanggaran spektrum frekuensi terhambat dan tidak berjalan dengan semestinya serta memakan waktu yang tidak sebentar. Adapun Rumusan Masalah (1) Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan oleh Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Komunikasi dan Informatika Pekanbaru Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Frekuensi Radio Tanpa Izin dan (2) Bagaimanakah hambatan Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Komunikasi dan Informatika Pekanbaru dalam melaksanakan pelaksanaan penyidikan Penggunaan Frekuensi radio tanpa izin. Kesimpulan hasil penelitian ini adalah : (1) Pelaksanaan Penyidikan tindak pidana spektrum frekuensi oleh PPNS Balmon terdiri dari : penyidikan, penindakan, pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan Berkas Perkara yang akan diserahkan oleh Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil kepada Penyidik Polri yang mana pelaksanaan penyidikan pelanggaran spektrum frekuensi tersebut, PPNS Balmon harus melakukan koordinasi dengan Penyidik Polri, agar terlaksana penyidikan dengan semestinya dimana Penyidik Polri akan memberikan bantuan berupa bantuan taktis, teknis, upaya hukum. (2) Hambatan yang dialami PPNS Balmon dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana penggunaan spektrum frekuensi radio adalah kurangnya koordinasi antara PPNS Balmon dan Penyidik Polri serta tidak menjalankan amanat sesuai UU masing-masing dan masih adanya budaya egoisme antara dua lembaga. Karena itu, kedua instansi baik PPNS Balmon maupun Polri seakan-akan menyepelkan koordinasi dalam penyidikan tindak pidana spektrum frekuensi radio mengakibatkan penyidikan pelanggaran frekuensi tersebut tidak berjalan secara optimal.

**Kata Kunci : Penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Tindak Pidana, Spektrum Frekuensi Radio**

**IMPLEMENTATION OF INVESTIGATIONS BY OFFICIAL CIVIL  
SERVANT INVESTIGATORS (PPNS) MINISTRY OF COMMUNICATIONS  
AND INFORMATICS ON CRIMINAL ACTS OF ILLEGAL USE OF RADIO  
FREQUENCY SPECTRUM**

*(Rian Rusmana Putra, 2020112065, Master of Law Study Program, Faculty of  
Law, Andalas University, 144 Pages, 2022)*

**ABSTRACT**

*The investigation into the criminal act of using a radio frequency spectrum without a permit will be carried out after knowing that there is interference with another radio frequency. Disturbances in these frequencies can cause danger and harm the community, for example in the aviation sector there will be communication disturbances between the Pilot and the Air Traffic Controller. Based on Law Number 36 of 1999 concerning Telecommunications in Article 38, it is prohibited for anyone to carry out actions that can cause physical and electromagnetic disturbances to other telecommunications operations. The delay in coordination assistance by the National Police Investigator to PPNS Balmon resulted in the investigation of violations of the frequency spectrum being hampered and not running properly and taking a long time. As for the formulation of the problem (1) How is the investigation carried out by the Civil Servant Investigator of the Ministry of Communication and Information Pekanbaru against the Crime of Using Radio Frequency Without a Permit and (2) What are the obstacles to the Investigator of Civil Servant Officials (PPNS) of the Ministry of Communication and Information Pekanbaru in carrying out the investigation of the Use of Radio Frequency without a permit. The conclusions of the results of this study are: (1) The implementation of the frequency spectrum criminal investigation by PPNS Balmon consists of: investigation, prosecution, examination, completion and submission of case files which will be submitted by Civil Servant Official Investigators to Polri Investigators which carry out investigations of spectrum violations. With this frequency, PPNS Balmon must coordinate with Polri Investigators, so that investigations are carried out properly where Polri Investigators will provide assistance in the form of tactical, technical and legal assistance. (2) Barriers experienced by PPNS Balmon in conducting investigations into criminal acts of using radio frequency spectrum are the lack of coordination between PPNS Balmon and Police Investigators and not carrying out the mandate according to their respective laws and the existence of a culture of egoism between the two institutions. Therefore, the two agencies, both PPNS Balmon and the Police, seem to have underestimated the coordination in the investigation of radio frequency spectrum crimes, resulting in the investigation of frequency violations not running optimally.*

*Keywords: Investigation, Civil Servant Investigator, Crime, Radio Frequency Spectrum.*